LENTERA: Journal of Gender and Children Studies
Volume 5 Issue 1, June 2025
E-ISSN 2721-0820
P-ISSN 2776-0251
Page 425-440

PEKKA, FEMINISASI KEMISKINAN DAN KETIDAKADILAN SOSIAL

Dina Rahmawati[1]*, Mohamad Febrianto[2]

[1,2] Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Jalan Ahmad Yani, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya 60237, Jawa Timur

[1]dinarahmawati810@gmail.com, [2] b94218102@uinsby.ac.id

Abstract

Life in densely populated residential areas located in the heart of a metropolitan city such as Surabaya City, is highly dependent on work income outside the home. While income growth is much slower than development and has destroyed the use value of the environment, it is inevitable. Finally, the phenomenon of modernized poverty becomes unavoidable. The condition becomes even more discriminatory when it is pointed out that most of the poor household heads living in this area are women. This paper aims to explain the social injustice practices of women heads of poor households in urban areas by using class analysis, cultural analysis, gender analysis, and critical analysis that aims to provide the meanings, conceptions, ideologies, and practices that are happening in female heads of poor households in urban areas. The reality of social injustice experienced by women heads of poor households is an issue that cannot be covered up anymore about future social conditions. Theoretical analysis born from this fact has sparked a variety of critical thinking. First, class analysis tries to understand the form of economic injustice and its relation to the broader social system. The process of industrialization and urbanization has contributed to the instability of urban society. Secondly, Gramsci's thought discusses ideology and culture and challenges both because they are considered tools and part of those who benefit from perpetuating injustice. Gramsci saw that this condition was born because there was an effort to maintain power by the ruling and capitalist classes, in the sense that it was not only limited to state authorities but all dominant groups in society, called hegemony. The third idea is supported by the critical theory of the Frankfurt school, which questions the methodology and epistemology of positivism as a source of injustice. What needs to be done is to fight the hegemony that demeans women, by deconstructing ideology.

Keywords*: Female Heads of Poor Households, Feminization of Poverty, Social Injustice.*

Abstrak

Kehidupan di wilayah perkampungan padat penduduk yang berlokasi di jantung kota metropolitan seperti di Kota Surabaya, sangat tergantung pada penghasilan kerja di luar rumah. Sementara pertumbuhan penghasilan yang jauh lebih lambat ketimbang pembangunan yang telah menghancurkan nilai guna lingkungan tidak bisa dihindari. Akhirnya fenomena kemiskinan yang termodernisasi, menjadi tidak terelakkan. Kondisi tersebut menjadi nampak lebih diskriminatif, ketika ditunjukkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar kepala rumah tangga miskin yang tinggal di wilayah ini adalah kaum perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan praktek ketidakadilan sosial

Received: 8 May 2025 ; Accepted: 13 May 2025 ; Published: 1 June 2025
*Corresponding author: Departement of Islamic Communication and Broadcasting, Faculty of Dakwah and Communication, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jalan Ahmad Yani, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya 60237, Jawa Timur
Email: [1]dinarahmawati810@gmail.com

perempuan kepala rumah tangga miskin di perkotaan dengan menggunakan analisis kelas, analisis kultural, analisis gender dan analisis kritis yang bertujuan memberikan makna, konsepsi, ideologi dan praktek yang sedang terjadi dalam rumah tangga PEKKA di perkotaan. Realita ketidakadilan sosial yang dialami oleh perempuan kepala rumah tangga miskin merupakan persoalan yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi tentang kondisi kemasyarakatan di masa mendatang. Analisa teori yang lahir dari fakta tersebut mencetuskan berbagai pemikiran yang kritis. Pertama, analisis kelas yang mencoba memahami bentuk ketidakadilan ekonomi dan kaitannya dengan sistem sosial yang lebih luas. Proses industrialisasi dan urbanisasi memberikan kontribusi terhadap ketidakstabilan tatanan masyarakat di perkotaan. Sehingga disparitas antara golongan pemilik modal dan golongan proletar nampak kasat mata. Kedua, pemikiran Gramsci yang membahas ideologi dan kultural serta menggugat keduanya karena dianggap sebagai alat dan bagian dari mereka yang diuntungkan untuk melanggengkan ketidakadilan. Gramsci melihat kondisi tersebut lahir karena ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa maupun kelas kapitalis, dalam artian tidak hanya terbatas pada penguasa negara tapi semua kelompok dominan dalam masyarakat, yang disebut hegemoni. Pemikiran ketiga adalah dukungan teori kritis (critical theory) mazhab Frankrut yang mempersoalkan metodologi dan epistemologi positivisme sebagai sumber ketidakadilan. Hal yang perlu diupayakan adalah melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan dekontruksi ideologi.

***Kata kunci**: PEKKA, Feminisasi kemiskinan, Ketidakadilan sosial.*

PENDAHULUAN

Berakhirnya perang dunia dua dan dimulainya paradigma pembangunan bernafaskan modernisasi yang ‘harus’ dilaksanakan di negara-negara kawasan Asia Afrika oleh Amerika dan sekutunya, memiliki konsekuensi sosial, budaya, politik dan ekonomi bagi kaum perempuan. Pembangunanisme (*developmentalism*) dan demokrasi yang dielu-elukan memberikan kebaikan bagi umat manusia tak luput dari kritikan dan kekecewaan mendalam dari berbagai belahan dunia. Dogma pembangunanisme yang dipaksakan secara struktural lewat mekanisme hutang, donor, dan bantuan luar negeri oleh lembaga multilateral internasional ternyata tidak hanya buta terhadap realitas Dunia Selatan, tetapi juga telah menggali jurang kemiskinan dan penyingkiran kaum lemah dan tidak memiliki akses, terlebih perempuan. Marginalisasi perempuan menjadi tidak terelakkan, terlebih mereka tidak terwakili secara proporsional di antara kelompok miskin dan tak punya kekuasaan di dunia. Kemiskinan memiliki wajah perempuan, ibarat dua sisi mata uang yang digambarkan oleh Ignacio Ellacuria sebagai tubuh yang kolektif *(collective body)* dan merupakan mayoritas dari umat manusia (Ellacuria, 1993).

Dampak riil yang sering kita lihat adalah kondisi kemiskinan, keterbelakangan ilmu pengetahuan dan kurangnya akses para perempuan Dunia Ketiga yang telah mendorong 'migrasi', yang luar biasa. Ironisnya, para perempuan ini tidak hanya dijadikan buruh murah, namun sebagian besar perempuan migran ini juga dijadikan budak seks dan korban kekerasan seksual di negara-negara maju. Tak sedikit pula para perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga, karena suami tidak lagi 'mampu' memenuhi kebutuhan primer keluarganya. Inilah bentuk nyata feminisasi kemiskinan. Setidaknya dari jumlah total penduduk dunia yang berjumlah 5,7 miliar, lebih dari 1 milyar jiwa terancam kemiskinan mutlak, 70-80 persen dari jumlah tersebut adalah perempuan. Kondisi di atas disinyalir karena dampak dari program *Structural Adjustment Program* (SAP) oleh Bank Dunia dan *Official Development Assistance* dengan Jepang sebagai penyandang dana terbesarnya. Keduanya telah memaksa negara-negara miskin melakukan liberalisasi ekonomi dan privatisasi institusi ekonomi dan keuangan negara. Tak pelak, negara-negara selatan dan Dunia Ketiga secara kejam memangkas dana kesejahteraan sosial, melakukan swastanisasi perusahan negara, pembangunan pertanian berorientasi ekspor dan sebagainya (Matsui, 2002).

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apa sebenarnya yang sedang dialami oleh perempuan? Mengapa feminisasi kemiskinan terjadi? Bagaimana bisa mengubah dan memperbaiki dunia sosial untuk membuatnya menjadi tempat yang lebih adil? Menanggapi pertanyaan itu, keilmuan feminis telah menghasilkan sejumlah jawaban yang dapat digeneralisasi untuk memahami wanita hadir di dalam sebagian besar situasi sosial. Ketika mereka tidak hadir, bukan karena mereka kekurangan kemampuan atau minat, tetapi karena ada usaha-usaha yang sengaja untuk menyisihkan mereka. Tulisan ini mencoba secara sederhana memahami realitas perempuan kepala rumah tangga di masyarakat miskin perkotaan melalui multi perspektif dengan menggunakan analisis kelas, analisis kultur, analisis gender dan paradigma kritis.

Perspektif tentang perempuan yang diarahkan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dialami perempuan, tidak lain akan terfokus pada teori sosial konflik yang menentang kemapanan struktur sosial. Cara pandang itu sudah dimulai pada

abad ke 19 oleh Karl Marx yang membuat teori sistematis tentang kehidupan masyarakat di mana suasana konflik memainkan peran yang sangat penting. Pendapat Marx bahwa konflik dalam masyarakat terjadi karena adanya kelas-kelas sosial yang memiliki kepentingan berbeda, yaitu antara kelas atas (mereka yang memiliki alat produksi) dan kelas bawah (mereka yang tidak memiliki alat produksi). Hal serupa juga dapat dianalogikan pada hubungan antar laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki menguasai ekonomi sedangkan perempuan tidak diberikan arti ekonomis terhadap apa yang mereka kerjakan di sektor domestik. Hal ini dapat dilihat juga pada tulisan Collin yang menerapkan teori Marx dan Engels secara sistematis di dalam pola relasi sosial di dalam keluarga. Teori Marx dan Engels ini dijadikan dasar untuk menganalisis kedudukan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat. Dikatakan bahwa kaum pria diibaratkan sebagai kaum borjuis dan kaum perempuan sebagai kaum proletar yang tertindas, baik dalam kaitan fungsi ekonomi, seksual dan pembagian properti di dalam keluarga (Megawangi, 1999).

Konteks untuk menjelaskan mengapa feminisasi kemiskinan terjadi, sangat tepat jika merujuk pada pemikiran Gramsci tentang konsep hegemoni. Ada empat hal yang patut dicatat dalam teori Gramsci, namun dalam konteks tulisan ini yang paling dianggap relevan adalah dua hal. Pertama, berbeda dengan teori Marxis, Gramsci berpendapat bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat pluralitas ideologi. Kedua, berbeda dengan teori Marx yang menyebut bahwa konflik hanya di sekitar hubungan produksi, konflik antarkelas; Gramsci menyatakan bahwa konflik tidak hanya antarkelas, tetapi konflik antara kelompok-kelompok dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat global (umum) untuk mendapatkan kontrol ideologi dan politik terhadap masyarakat (Illich, 2002). Hegemoni adalah suatu loyalitas yang bersifat spontan dari golongan massa yang ditujukan kepada kelompok sosial yang dominan karena keunggulan intelektual dan sosial maupun ekonomi, serta merupakan aliansi kelas yang mendominasi kelas lain. Di sini dominasi kultur yang tidak adil, dominasi serta penindasan politik harus dilegitimasi. Masyarakat dijinakkan secara sukarela *(consent)* menerima status quo dan hubungan yang tidak adil tersebut. Relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah

tangga perempuan kepala rumah tangga miskin dipahami sebagai bentuk hegemoni yang dilegitimasi dan memproduksi kesenjangan sosial karena dianggap sebagai alat dan bagian dari 'mereka' yang diuntungkan untuk melanggengkan ketidakadilan. Uraian di atas akan lebih jelas jika kacamata analisis gender dipasang dengan menggunakan kerangka berfikir seperti yang diuraikan oleh Mansour Faqih melalui konsep *gender differences* dan *gender inequalities.* Bahwa manifestasi gender pada posisi perempuan akan melahirkan *subordinasi, marginalisasi, stereotipe, double-burden, violence dan cooptation* untuk memahami kondisi perempuan dalam keluarga miskin.

Pada akhirnya komitmen kepada transformasi sosial demi keadilan untuk melawan struktur ketidakadilan yang dialami oleh perempuan adalah ciri khas teori sosial kritis. Suatu komitmen yang dilahirkan dalam aliran *Frankrut School* dan dikembangkan oleh minoritas- minoritas sosial dan etnik dan didalam masyarakat-masyarakat postkolonial. Patricia Hill Collins menyatakan dengan kuat pentingnya komitmen untuk mencari keadilan melawan ketidakadilan. Komitmen kepada penteorian kritis mengehendaki agar para feminis menanyakan bagaimana karya mereka akan memperbaiki kehidupan sehari-hari orang yang mereka pelajari (Ritzer, 2012). Karena memperjuangkan perempuan tidak sama dengan perjuangan perempuan melawan laki-laki. Persoalan penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat. Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi dan bukan gerakan untuk membalas dendam kepada laki-laki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini hendak mendeskripsikan berbagai perilaku dan sikap perempuan sebagai kepala rumah tangga pada masyarakat miskin. Penelitian ini difokuskan pada pokok bahasan tentang Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang tinggal di wilayah pusat perkotaan yang tinggal di kampung 'kelinci' yang padat dan kumuh. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive*. Peneliti menentukan pilihan informan secara *purposive* yang memiliki kategori sebagai berikut: (1) Perempuan yang

sudah tidak punya suami dan memiliki anak usia sekolah; (2) Istri yang suaminya ’cacat’ baik fisik (sakit permanent) maupun sosial (pengangguran) dan memiliki anak usia sekolah; dan (3) Perempuan yang belum menikah menanggung beban ekonomi keluarga dan membiayai anak usia sekolah.

Lokasi penelitian berada di Kampung Keputran, tepatnya di Keputran Panjunan Gang II, Kelurahan Embong KaliAsin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Adapun alasan dipilihnya sebagai lokasi penelitian, karena wilayah ini memiliki jumlah perempuan sebagai kepala rumah tangga di keluarga-keluarga yang miskin dengan jumlah yang cukup memadai dan hasil penelitian diharapkan memiliki kelanjutan yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya untuk mengetahui sejarah, pandangan dan perkembangan sebuah fenomena. Data sekunder adalah jenis data yang mengutip dari sumber lain. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan proses *in depth interview* (wawancara mendalam), yakni kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan memberikan kerangka dan garis besar pokok- pokok yang akan ditanyakan dalam wawancara.Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan untuk menggali informasi mengenai model pemberdayaan perempuan kepala rumah tangga miskin. Instrumen yang digunakan dalam tahap ini adalah pedoman wawancara dalam bentuk wawancara terbuka. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data tertulis seperti: monografi kelurahan/kecamatan, data-data statistik dan informasi yang didapatkan di internet, surat kabar, dan jurnal (Moleong, 2001). Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisa data juga merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.Tahapan-tahapan analisa data dalam penelitian ini meliputi reduksi, *display data* dan verifikasi (Singarimbun & Efendi, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini menguraikan realitas kompleks yang dialami oleh PEKKA dalam lanskap sosial yang sarat ketimpangan. Sub bab pertama adalah Apa yang Sedang Dialami PEKKA, akan menggambarkan situasi nyata yang dihadapi para PEKKA dari aspek ekonomi, sosial, maupun struktural. Pemahaman terhadap kondisi aktual mereka bertujuan mengajak dan melihat bagaimana peran ganda, beban kerja berlapis, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya memperkuat posisi rentan mereka dalam sistem sosial yang belum berpihak.

Sub bab kedua adalah Mengapa Feminisasi Kemiskinan Terjadi. Bab ini menelusuri akar penyebab ketimpangan tersebut, mulai dari bias gender dalam kebijakan hingga konstruksi budaya patriarkal yang menghambat mobilitas perempuan. Sub bab terakhir adalah Bagaimana Bisa Mengubah dan Memperbaiki Dunia Sosial, dibahas strategi dan pendekatan yang dapat dilakukan untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih adil dan inklusif. Pendekatan pemberdayaan berbasis keadilan gender dan perubahan struktur sosial dalam artikel mengusulkan jalan keluar menuju masyarakat yang lebih setara bagi PEKKA dan kelompok rentan lainnya.

1. Apa yang Sedang Dialami PEKKA?

Kondisi untuk menjelaskan kemiskinan di perkotaan merupakan tantangan utama dalam kehidupan yang semakin memacu kearah liberalism (Mercado et al., 2007). Bila pembicaraan diarahkan kepada pengkajian satu teori besar yang difokuskan pada realitas kehidupan PEKKA, maka sandaran teori konflik akan sangat jeli berhasil menjelaskannya dalam *frame* kacamata teori kelas (Simon, 2016; Risnawati et al., 2016; Hatibie, 2024). Pendapat Marx bahwa konflik dalam masyarakat terjadi karena adanya kelas-kelas sosial yang memiliki kepentingan berbeda, yaitu antara kelas sosial atas (mereka yang memiliki alat produksi) dan kelas bawah (mereka yang tidak memiliki alat produksi) (Megawangi, 1999). Marx memberi penjelasan akan terjadinya

ketidakharmonisasn relasi borjuis-proletar. Bagi Marx kapitalisme telah membuat jurang pemisah dan membuatnya terbelahnya masyarakat dalam kelas yang berlawanan dengan kelas proletar, pemilik tenaga/sarana produksi, atau kaum buruh (Syam, 2009).

Lokasi Keputran Panjunan II yang padat penghuni dan miskin ‘dijepit’ oleh bangunan mewah dan modern, menjawab pertanyaan bahwa komunitas PEKKA merupakan kelas yang secara struktur merupakan kelompok masyarakat yang ditindas dan dihisap oleh kelompok borjuis. Proses industrialisasi dan urbanisasi memberikan kontribusi terhadap ketidakstabilan tatanan masyarakat di perkotaan. Sehingga disparitas antara golongan pemilik modal dan golongan proletar nampak kasat mata.

Marxisme menilai bahwa kapitalisme di perkotaan mempertahankan penindasan terhadap perempuan demi memperoleh keuntungan. Pertama, eksploitasi perempuan di dalam rumahtangga akan membuat buruh laki-laki di pabrik lebih produktif. Kedua, perempuan juga berperan dalam reproduksi buruh murah, sehingga memungkinkan harga tenaga kerja lebih murah. Ketiga, masuknya buruh perempuan sebagai buruh dengan upah lebih rendah menciptakan buruh cadangan. Melimpahnya buruh cadangan memperkuat posisi tawar-menawar para pemilik modal dan mengancam solidaritas buruh. Semuanya ini akan mempercepat akumulasi kapital bagi kapitalis. Teori konflik yang mendapat kritik dari sejumlah ahli, yaitu Dahrendorf dan Randall Collins yang tidak sepenuhnya sependapat dengan Marx, menyatakan bahwa konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan sebagainya (Umar, 1999).

2. Mengapa Feminisasi Kemiskinan Terjadi?

Kemiskinan bukanlah fenomena yang lahir dengan sendirinya dan tidak muncul tanpa sebab. Realitas ini dipengaruhi oleh struktur, ekonomi dan politik

(Ribotta, 2023). Dengan kata lain, terdapat faktor struktural baik ekonomi, politik dan budaya yang menyebabkan individu dalam keluarga dan masyarakat tidak mempunyai akses yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Gramsci melihat kondisi tersebut lahir karena ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa maupun kelas kapitalis, dalam artian tidak hanya terbatas pada penguasa negara tapi semua kelompok dominan dalam masyarakat, yang disebut hegemoni (Fusaro, 2022; Cervera-Marzal, 2022). Bagi Gramsci hegemoni merupakan salah satu cara diantara dua cara kelas dominan menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya, cara satunya adalah kekerasan. Bila kekerasan bersifat represif, maka hegemoni adalah cara penguasaan yang bersifat persuasif (Syam, 2009). Kultur yang melahirkan simbol-simbol dan wacana bahasa, menjadi pilihan yang paling dianggap strategis untuk menciptakan situasi yang bersifat hegemonik.

Gramsci memperkuat analisis status dan peran perempuan dalam sebuah kultur di dalam masyarakat. Pandangan yang dikemukakan oleh Siti Kusujiarti, menyatakan bahwa peranan penting wanita dalam sektor ekonomi dan pengelolaan rumah tangga belum tentu menunjukkan tingginya status yang tinggi dan kekuasaan wanita. Justru wanita memiliki beban ganda karena mereka harus mencari nafkah untuk keluarga dan juga dituntut untuk menyelesaikan sebagian besar pekerjaan domestik sehingga mereka harus membagi waktu dan sumber daya untuk memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan. Perempuan ini pada umumnya tidak memiliki kontrol terhadap diri dan kegiatannya, mereka lebih banyak lebih banyak menjadi sasaran ideologi gender yang hegemonik yang menimbulkan subordinasi terhadap perempuan (Abdullah, 2003).

Analisis Mansour Faqih tentang persoalan yang muncul pada perempuan kepala rumah tangga miskin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Kemiskinan yang menyelimuti kehidupan perempuan kepala rumah tangga miskin muncul karena proses marginalisasi. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kemiskinan seperti penggusuran, bencana alam atau proses

eksploitasi. Fakta di wilayah penelitian menunjukkan bahwa sejak masuknya pihak pengembang properti raksasa membeli lahan penduduk setempat dan menyulapnya menjadi kawasan perumahan elit, hal yang segera tidak dapat dihindari adalah hilangnya lapangan pekerjaan di bidang pertanian. Akibatnya, kelompok masyarakat seperti buruh tani merupakan golongan masyarakat yang pertama kali mengalami marginalisasi yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah lagi. Dengan demikian, mekanisme marginalisasi terhadap perempuan kepala rumah tangga miskin tidak bisa terhindar.

b. Gender dan Subordinasi

Pandangan subordinasi bahwa posisi perempuan tidak penting karena anggapan bahwa perempuan irrasional, emosional dan tidak bisa memimpin tidak berlaku pada perempuan kepala rumah tangga miskin. Sosok perempuan kepala rumah tangga miskin membuktikan ketangguhannya membesarkan anak dan mengelola segala kebutuhan rumah tangga. Bagi perempuan miskin, persoalan kemiskinan secara ekonomi sendirilah yang meminggirkan persoalan-persoalam gender. Dengan kata lain, dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu berkaitan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi perempuan.

c. Gender dan Stereotipe

Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Kultur dan kebiasaan yang dikembangkan masyarakat memunculnya *brand image* di masyarakat yang sering menganalogikan peran perempuan kepala rumah tangga miskin ke arah negatif.

d. Gender dan Kekerasan

Kekerasan *(violence)* adalaha serangan atau invasi *(assault)* terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Bagi seorang perempuan kepala

rumah tangga miskin sangat rentan terhadap *sexual and emotional harassment.* Hal-hal seperti lelucon jorok secara vulgar dengan cara yang dirasakan ofensif maupun menyakiti atau membuat malu dengan omongan kotor merupakan hal yang paling umum dilakukan masyarakat.

e. Gender dan Beban Kerja

Anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga terbantahkan dalam kasus sosok perempuan kepala rumah tangga. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat harus ditanggung perempuan sendiri. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi pada dasarnya peran ganda perempuan kepala rumah tangga miskin bukanlah suatu hal baru. Bagi mereka, peran ganda ini telah ditanamkan sejak dini, yang membuat perempuan harus terlibat dalam kewajiban kerja untuk menambah pendapatan keluarga (Faqih, 2005).

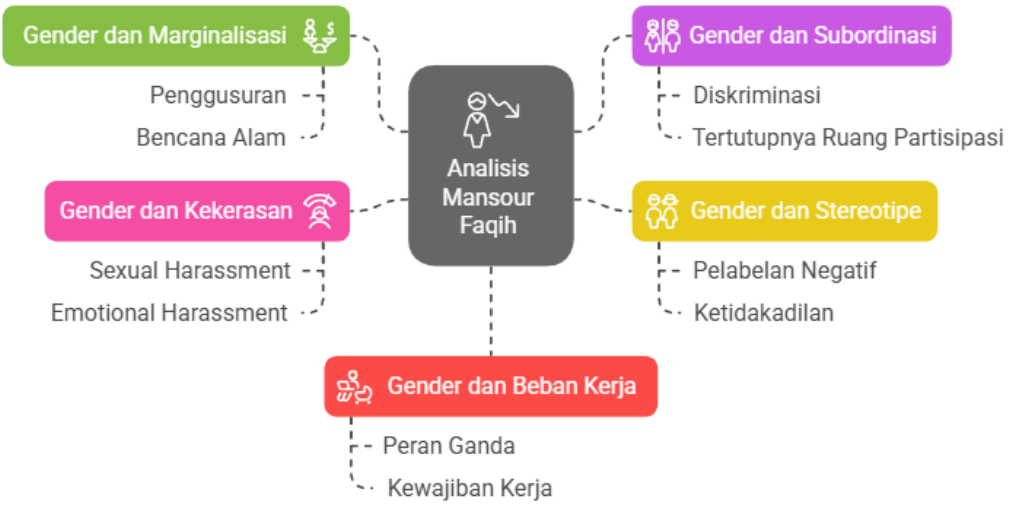

Gambar 1. Analisis Mansour Faqih tentang perempuan kepala rumah tangga miskin

Akhirnya dapat disimpulkan di sini bahwa dimensi kemiskinan bagi seorang perempuan kepala rumah tangga ternyata jauh lebih kompleks dan berbeda dibandingkan laki-laki. Keterbatasan areal pemukiman dan karakteristik sosial ekonomi kehidupan kota ternyata juga membawa dampak yang jauh lebih berat bagi perempuan miskin yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan perempuan miskin yang tinggal di pedesaan. Industrialisasi yang berlangsung di

perkotaan tidak begitu menguntungkan perempuan karena produk industri didasarkan pada unit besar yang padat modal dan ini berarti mengurangi tenaga kerja. Mereka hanya membutuhkan tenaga terampil sebab pekerjaan yang ada hanya terbatas pada pekerjaan terampil. Di sini juga terungkap bahwa perempuan miskin bukanlah individu yang pasif dan hanya menerima begitu saja tanggung jawab sosial ekonomi yang dibebankan pada mereka. Kalaupun perempuan bekerja mencari nafkah, itu semua merupakan hasil dari interpretasi mereka terhadap realitas kemiskinan yang mereka hadapi. Dengan demikian hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa perempuan kepala rumah tangga miskin di Keputran Panjunan gang II adalah realitas semu yang membutuhkan kajian lebih kritis, karena mereka menghadapi rintangan kultural yang patriarki dan institusional.

3. Bagaimana Bisa Mengubah dan Membuat Dunia Sosial menjadi Tempat yang Lebih Adil?

Konstruksi dan reproduksi ketimpangan hubungan gender memang mewarnai pelbagai lini pada pola relasi gender. Suatu hal yang harus disadari bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut dan harus ada upaya untuk menempatkan perempuan sebagai layaknya manusia. Pendapat yang bisa dipakai sebagai *stand point* untuk dijadikan argumen agar melihat konstruksi dan reproduksi perempuan dalam ketimpangan gender adalah dengan menerima pemikiran dari mazhab Frankrut yang kritis untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat, karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens, dimana kita masing-masing terlibat secara emosional. Banyak terjadi perlawanan manakala perjuangan ketidakadilan gender diaktifkan, karena menggugat masalah gender sesungguhnya juga berarti menggugat *privilige* yang didapatkan dari adanya ketidakadilan gender. Persoalannya, spektrum ketidakadilan gender sangat luas, mulai yang ada di kepala dan di dalam keyakinan kita masing-masing sampai urusan negara.

Dengan demikian bila kita memikirkan jalan keluar, pemecahan masalah gender perlu dilakukan secara serempak. Pertama-tama perlu upaya-upaya yang bersifat jangka pendek yang dapat memecahkan masalah-masalah praktis ketidakadilan tersebut. Sedangkan langkah berikutnya adalah usaha jangka panjang untuk memikirkan bagaimana menemukan cara-cara strategis dalam rangka memerangi ketidakadilan.

Untuk itu ada beberapa agenda guna mengakhiri sistem yang tidak adil dengan menekankan pada poin-poin berikut ini:

1. Melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan *dekontruksi ideologi.* Melakukan dekonstruksi artinya, mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan dimana saja, pada tingkat dan dalam bentuk apa saja. Pertanyaan tersebut dapat dimulai dari kasus yang makro, seperti *Women In Development* (WID), sampai kasus-kasus yang dianggap kecil yakni pembagian peran gender di rumah tangga. Di sisi lain upaya untuk melakukan pendidikan yang bersifat kritis *(critical education)* atau kegiatan apa saja yang akan membantu perempuan memahami pengalamannya dan menolak ideologi dan norma yang dipaksakan kepada mereka. Tujuan upaya tersebut adalah munculnya kesadaran kritis *(Gender Critical Consciousmess)* yakni kesadaran akan ideologi hegemini dominan dan kaitannya dengan pendindasan gender. Maka, tugas utama yang harus dilakukan adalah membentuk visi yang berakar pada sistem *modernisasi, developmentaslism* dan kapitalisme. Melalui pendidikan kritis, akan lahir gagasan dan nilai baru yang menjadi dasar bagi transformasi gender.

2. Melawan paradigma *developmentalism* yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Karena perempuan dianggap tidak mampu memecahkan maslaahnya sendiri, maka program perlu didesain oleh perencana ahli yang kemudian dikirimkan kepada mereka. Perempuan dianggap sebagai obyek pembangunan, yakni kemudian dikirimkan kepada

mereka. Perempuan dianggap sebagai objek pembangunan, yakni diidentifikasi, diukur dan diprogramkan. Perempuan juga dianggap sebagai objek pengembangan pengetahuan mereka. Karena *knoweledge is power*, maka riset terhadap perempuan adalah juga proses dominasi. Tujuan riset mereka adalah untuk memahami perempuan, agar dapat melakukan prediksi perilaku dalam rangka merekayasa peranannya dalam pembangunan. Dengan demikian perjuangan perempuan termasuk senantiasa mempertanyakan dominasi elit yang menggunakan pengetahuan dan *diskursus pembangunan* dari hegemoni kapitalisme dan modernisasi (Faqih, 2005).

KESIMPULAN

Fenomena perempuan sebagai kepala rumah tangga miskin adalah fenomena yang bersifat *cross sectors problem, cross areas* dan *cross generation.* Realita ketidakadilan sosial yang dialami oleh perempuan kepala rumah tangga miskin merupakan persoalan yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi tentang kondisi kemasyarakatan di masa mendatang. Analisa teori yang lahir dari fakta tersebut mencetuskan berbagai pemikiran yang kritis.

Pertama, analisis kelas yang mencoba memahami bentuk ketidakadilan ekonomi dan kaitannya dengan sistem sosial yang lebih luas. Wilayah yang padat penghuni dan miskin ‘dijepit’ oleh bangunan mewah dan modern, menjawab pertanyaan bahwa komunitas PEKKA merupakan kelas yang secara struktur merupakan kelompok masyarakat yang ditindas dan dihisap oleh kelompok borjuis. Proses industrialisasi dan urbanisasi memberikan kontribusi terhadap ketidakstabilan tatanan masyarakat di perkotaan, sehingga disparitas antara golongan pemilik modal dan golongan proletar nampak kasat mata.

Kedua, pemikiran Gramsci yang membahas ideologi dan kultural serta menggugat keduanya karena dianggap sebagai alat dan bagian dari mereka yang diuntungkan untuk melanggengkan ketidakadilan. Gramsci melihat kondisi tersebut lahir karena ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa maupun kelas kapitalis, dalam artian tidak hanya terbatas pada penguasa negara tapi

semua kelompok dominan dalam masyarakat, yang disebut hegemoni. Bahwa peranan penting wanita dalam sektor ekonomi dan pengelolaan rumah tangga belum tentu menunjukkan tingginya status yang tinggi dan kekuasaan wanita. Justru wanita memiliki beban ganda karena mereka harus mencari nafkah untuk keluarga dan juga dituntut untuk menyelesaikan sebagian besar pekerjaan domestik sehingga mereka harus membagi waktu dan sumber daya untuk memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan. Perempuan ini pada umumnya tidak memiliki kontrol terhadap diri dan kegiatannya, mereka lebih banyak lebih banyak menjadi sasaran ideologi gender yang hegemonik yang menimbulkan subordinasi terhadap perempuan.

Pemikiran ketiga adalah dukungan teori kritis *(critical theory)* mazhab Frankrut yang mempersoalkan metodologi dan epistemologi positivisme sebagai sumber ketidakadilan. Hal yang perlu diupayakan adalah melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan *dekontruksi ideologi.* Tujuan upaya tersebut adalah munculnya kesadaran kritis *(Gender Critical Consciousmess)* yakni kesadaran akan ideologi hegemoni dominan dan kaitannya dengan penindasan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I. (2003). *Sangkan paran gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cervera-Marzal, M. (2022). Hegemony: A useful concept in times of crisis. *Soundings: An Interdisciplinary Journal, 105*(1), 1–27.

Ellacuría, I. (1993). *Systematic theology: Perspektif from liberation theology*. New York: Orbis Book.

Faqih, M. (2005). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fusaro, L. (2022). Gramsci: Concepto de hegemonía nacional e internacional. *Ola Financiera, 15*(42), 197–235.

Hatibie, Y. (2024). Pertentangan kelas dalam novel *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer. *Reduplikasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, 4*(2), 90–115.

Illich, I. (2002). *Matinya gender* (Terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Matsui, Y. (2002). *Perempuan Asia: Dari penderitaan menjadi kekuatan*. Jakarta: YOI.

Megawangi, R. (1999). *Membiarkan berbeda*. Bandung: Mizan.

Mercado, S., Havemann, K., Sami, M., & Ueda, H. (2007). Urban poverty: An urgent public health issue. *Journal of Urban Health, 84*(Suppl 1), 7–15.

Moleong, L. J. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ribotta, S. (2023). Poverty as a matter of justice. *The Age of Human Rights Journal, (20)*, 7327–7340.

Risnawati, R., Anshari, A., & Abidin, A. (2016). Pertentangan dan kesadaran kelas dalam novel *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer (Pendekatan teori Marxis). *Retorika, 9*(1), 68–79.

Ritzer, G. (2012). *Teori sosiologi: Dari klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Simon, R. (2016). The conflict paradigm in sociology and the study of social inequality: Paradox and possibility. *Theory in Action, 9*(1), 1–31.

Singarimbun, M., & Efendi, S. (1995). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.

Syam, N. (2009). *Model analisis teori sosial*. Surabaya: IAIN Press.

Umar, N. (1999). *Argumen kesetaraan jender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.